

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Partisipasi

2.1.1.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi menurut KBBI memiliki arti turut berperan serta dalam suatu agenda kegiatan, keikutsertaan dan peran. Partisipasi berarti keikutsertaan sebagai individu dalam aktivitas yang disusun atau direncanakan. Partisipasi menurut Ndraha (1990) adalah bagian dari kegiatan bersama. Lebih luas pengertian partisipasi menurut Mubiyarto (1988) yaitu sebagai kesadaran untuk sedia mengikuti sebuah program agar mencapai tujuan diikuti kemampuan yang dimiliki tanpa berarti mengorbankan diri (Abidin, 2023). Partisipasi merupakan keterlibatan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Partisipasi diartikan sebagai peran serta dalam proses belajar yang melibatkan beberapa anggota masyarakat (Bahua, 2018). Partisipasi merupakan suatu kegiatan memberi, menurut Mikkelsen (1999) membagi 6 pengertian partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi merupakan pemberian sukarela dari individu kepada kelompok tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi yaitu membuat peka pihak masyarakat untuk meningkatkan kamauan dalam menanggapi proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah inisiatif dari masyarakat secara sukarela menyangkut adanya perubahan.
- d. Partisipasi adalah inisiatif dari perseorangan dengan menggunakan kebebasan dalam melaksanakan kegiatan.
- e. Partisipasi adalah proses yang diawali dengan adanya musyawarah antara masyarakat dan pemerintah setempat mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring untuk menciptakan dampak sosial atas potensi lokal yang dimiliki.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan diri dan pembangunan yang merdeka (Kawulur dkk., 2017).

Menurut Sumarno dan Sembodo (2006) dalam (Solihah dkk., 2018) partisipasi adalah interaksi antar *stakeholder* yang memunculkan kesepakatan dalam bentuk tindakan sehingga muncul kegiatan yang bersifat inovatif yang memungkinkan terjadi proses deliberatif, terdapat ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi. Menurut Thubany 2006 partisipasi akan terwujud dimulai dari kesiapan struktur kelembagaan agar dapat menampung struktur kelembagaan. Untuk berpartisipasi didasarkan pada pembuatan kesepakatan, penerapan kesepakatan, menikmati hasil dan evaluasi hasil. Terdapat 4 aspek yang mengendalikan suatu yang menjadi sebab terjadinya partisipasi diantaranya adanya informasi, inisiatif, terdapat apresiasi warga, mekanisme pengambilan keputusan dan kontrol pengawasan. Hal tersebut akan mendorong atau memotivasi suatu kelompok mengerjakan kesepakatan tindakan.

Partisipasi masyarakat menurut Konyers yaitu kegiatan yang dilakukan dengan ikhlas atas kesadaran masyarakat sendiri agar terlibat dari program pembangunan (Nielwaty dkk., 2023). Masyarakat adalah *stakeholder* yang sangat berperan penting dalam menyikapi sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dilakukan usaha memberikan kesadaran akan masalah yang dihadapi melalui kegiatan sosialisasi. Dengan kesadaran masyarakat ini maka program pembangunan akan berjalan.

2.1.1.2 Bentuk-bentuk Partisipasi

Keikutsertaan seseorang dalam kegiatan dapat berbeda-beda, maka terdapat bentuk partisipasi. Bentuk partisipasi adalah macam yang diberikan oleh seseorang, kelompok atau masyarakat. Pasaribu dan Simanjutak (1986) mengemukakan pendapat yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi ide atau buah pikiran, partisipasi ini biasa diberikan ketika proses persiapan kegiatan dalam acara rapat atau musyawarah. Partisipasi ini merupakan umpan balik yang diberikan oleh lisan seseorang.
- b. Partisipasi tenaga, partisipasi ini diberikan ketika saat pelaksanaan kegiatan untuk suatu perbaikan sehingga menghasilkan kegiatan yang efektif. Partisipasi tenaga juga merupakan pertolongan bagi orang lain.

- c. Partisipasi harta benda, artinya partisipan memberikan kemampuannya dalam bentuk uang atau barang untuk ikut andil dalam pembangunan.
- d. Partisipasi keterampilan, artinya seseorang melakukan bentuk usaha berupa kecakapan hidup yang dimilikinya untuk tujuan yang telah disepakati bersama.
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda perkumpulan, misalnya hadir dalam rapat, musyawarah, dsb (E. E. Lestari & Rachmat, 2021).

Partisipasi terbagi menjadi beberapa bentuk disesuaikan dengan kondisi individu atau internal dan kondisi lingkungannya. Partisipasi menggambarkan kemampuan yang dimiliki setiap anggotanya. Partisipasi dibagi menjadi beberapa bentuk agar memudahkan kegiatan yang akan dilakukan, agar tepat dalam keterlibatan sumber daya. Ada juga pendapat dari Sulaiman (1985) dalam (E. E. Lestari & Rachmat, 2021), beliau membagi bentuk partisipasi kedalam 5 macam, yaitu :

- a. Partisipasi langsung, memberikan peran secara fisik atau tatap muka, kehadiran seseorang akan menunjukkan keterlibatannya dalam sebuah kegiatan.
- b. Partisipasi uang atau barang, dalam sebuah kegiatan baiknya dana dan sarana berasal dari masyarakat itu sendiri, hal ini akan memberikan dampak merasa memiliki akan hasil yang nantinya diperoleh. Jika tidak ada maka boleh dari luar, namun hal ini bisa hanya dijadikan sebagai umpan atau bersifat sederhana.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan, partisipan memberikan motivasi agar kegiatan dapat berjalan.
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi ini berupa pemberian saran, pendapat, atau ide.
- e. Partisipasi representif, dengan memberikan kepercayaan berupa pemberian gelar atau sebutan terhadap seseorang yang kedudukannya tinggi dalam suatu organisasi atau panitia.

2.1.1.3 Tahapan Partisipasi

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2013) dalam menyebutkan partisipasi merupakan keterlibatan individu dalam kelompok sosial masyarakat untuk ambil bagian dari masyarakat. Ambil bagian maksudnya kegiatan yang menjadi program lokasi setempat pasti akan mencapai hasil, baik berupa informasi, keterampilan dsb. Beliau menjelaskan terdapat 5 tahapan partisipasi, yaitu memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan, bertindak bersama dan memberikan dukungan (Husna & Mustam, 2017).

Tahapan merupakan urutan seseorang dalam melakukan kegiatan. Memungkinkan adanya partisipasi apabila proses kegiatan sudah terstruktur. Kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik memungkinkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Cohen dan Uphoff berpendapat bahwa partisipasi terdapat beberapa tahapan:

- a. *Participation in decision making* (perencanaan) diwujudkan dengan keikutsertaan dalam rapat, sehingga dapat melihat adanya kontak secara langsung dengan pihak yang terlibat, hal ini merupakan titik awal perubahan sosial, artinya bahwa partisipasi merupakan kemitraan. Partisipasi dalam perencanaan diantaranya mengikuti rapat, sumbangan pemikiran, tanggapan, atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- b. *Participation in implementation* (pelaksanaan), sebuah respon positif dari perubahan yang sedang berlangsung merupakan wujud nyata berupa tenaga, keahlian, demi mendukung berjalannya kegiatan. Partisipasi dalam pelaksanaan berarti menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.
- c. *Participation in benefits* (pemanfaatan hasil), diantaranya peran memberikan tenaga, pikiran, keterampilan dan materi dalam kegiatan untuk turut menerima, memelihara dan mengembangkan hasil kegiatan. Partisipasi pemanfaatan hasil dapat dilihat dari peningkatan *output* dan presentase keberhasilan program.

- d. *Participation in evaluation* (evaluasi), misalnya ikut peran serta dalam menilai, mengawasi, memberikan komentar atau kritikan yang hal ini akan mempengaruhi keputusan selanjutnya (A. Y. Lestari dkk., 2019).

2.1.1.4 Tujuan partisipasi

Mikkelsen (2003) memiliki pendapat mengenai tujuan partisipasi yaitu, (1) agar masyarakat atau anggota dapat mengembangkan rencana kedepan sebagai suatu kesepakatan, dapat berupa dokumen, naskah, gambar, atau berupa laporan yang dihasilkan dari proses pendampingan. (2) menciptakan sebuah diskusi dari semua pihak guna memperoleh informasi yang relevan untuk tujuan yang diharapkan melalui komunikasi yang ditentukan (Karim, 2017). Tujuan partisipasi yang memberikan dukungan berupa emosi dan mental diharapkan adanya kejelasan rencana baik berupa tulisan atau gambar. Ketika suatu kegiatan tergambar dengan jelas maka akan meimbulkan penanaman yang kuat ketika mereka melakukan sesuatu.

2.1.1.5 Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi

Dwiningrum (2011) dalam (Hutagalung, 2022) menyebutkan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat yaitu sifat malas, aspek-aspek tipologis, geografis, demografis, dan ekonomi. Ada beberapa ahli yang menyebutkan dalam partisipasi terdapat faktor pendorong dan penghambat diantaranya terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

- a. Faktor internal, karakteristik masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang ada didalam kelompok tersebut. Menurut Slamet (1994) dalam (Husna & Mustam, 2017) tingkah laku individu ditentukan oleh:
 1. Pengetahuan dan keahlian, informasi yang didapatkan oleh individu akan menjadi sumber pengetahuan, hal ini akan mempengaruhi lingkungan dan masyarakat.
 2. Pekerjaan, individu dalam tingkat pekerjaan tertentu dapat meluangkan waktu atau bahkan tidak dapat meluangkan waktu sedikit untuk dapat berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Banyak ditemukan pada masyarakat yaitu adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

3. Jenis kelamin, sudah sangat diketahui sebagian masyarakat, masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.
 4. Kepercayaan terhadap budaya tertentu, masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi akan mengutamakan strategi partisipasi yang tinggi juga.
- b. Faktor eksternal

Menurut Sunarti (2003: 9) Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program seperti tim pendamping, sosialisasi oleh penyelenggara, aparat/pemimpin desa (Husna & Mustam, 2017). Biasanya memperkuat dari segi peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pihak *stakeholder*. Kesepakatan yang dibuat juga akan mempengaruhi partisipasi.

Lebih lanjut Kurnawanti dalam (Poetradewa & Wibowo, 2023) menjelaskan bahwa faktor pendukung partisipasi diantaranya kesempatan untuk berpartisipasi, adanya kemauan untuk berpartisipasi, dan adanya kemampuan untuk berpartisipasi. Faktor pendukung partisipasi memunculkan keterlibatan seseorang, ditandai dengan pemberian sumber daya. Faktor penghambatnya yaitu keterbatasan operasional yaitu hal-hal yang menyebabkan kurangnya informasi dan koordinasi, keterbatasan struktural atau kurangnya tenaga ahli dan kurangnya peraturan yang sesuai, dan yang terakhir yaitu keterbatasan sifat masyarakat diantaranya sikap apatis masyarakat. Waktu yang dibutuhkan akan semakin lama dalam mencapai tujuan karena kurangnya partisipasi.

2.1.2 Perempuan

2.1.2.1 Pengertian Perempuan

Perempuan dalam KBBI memiliki arti manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan juga menyusui. Pengertian perempuan

secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa. Rosaldo (1974) menyatakan bahwa perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah menjalankan perannya sebagai seorang istri dan sebagai ibu (Bunsaman & Taftazani, 2018). Menurut Fakih dan Hubeis dalam (Ramadhani & Hubeis, 2020) terdapat 3 kategori pada perempuan diantaranya (1) Peran reproduktif yang berarti peran utamanya sebagai istri dan seorang ibu. (2) Peran produktif, artinya turut mencari nafkah keluarga dan (3) Sosial yaitu peran produktif pekerja tidak dibayar (Ramadhani & Hubeis, 2020).

2.1.2.2 Partisipasi Perempuan

Partisipasi perempuan berarti keikutsertaan perempuan dalam suatu kegiatan yang didorong oleh kesadaran diri atas tanggung jawab yang dikehendakinya sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Dalam melaksanakan partisipasi perempuan tidak lepas dari peran yang melekat. Artinya perlu ada keseimbangan antara 3 peran tersebut. Kesadaran diri pada perempuan muncul salah satunya dari informasi yang diterima, menyebabkan bergerak melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Latar belakang pengetahuan dan keterampilan perempuan akan mempengaruhi partisipasi, sehingga perlu mengembangkan potensinya agar meningkatkan produktivitas kegiatan sehari-hari (Ulya, 2012) dalam (Bunsaman & Taftazani, 2018).

Salah satu partisipasi perempuan diantaranya dalam politik, hal ini menjadi topik menarik karena hal ini muncul setelah adanya paham kesetaraan gender. Partisipasi perempuan dalam politik bukanlah hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita, partisipasi wanita dalam pembangunan, telah banyak kemajuan yang telah dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang pemerintahan. Keterwakilan perempuan sangatlah penting dengan alasan sebagai berikut (Thalib, 2014) dalam (Priandi & Roisah, 2019): 1) Nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki 2) Pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional 3) Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut 4) Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial 5) Kurangnya *political will* Pemerintah 6) Kekurangan dalam kualitas individu dan kaderisasi politik. KPU mencatat Pada pemilu tahun 2019 perempuan

yang tergabung kedalam daftar calon tetap sejumlah 3.194 tentu hal ini telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengharuskan keterwakilan perempuan 30 Persen perempuan didalam daftar calon legislatif dipenuhi kontestan pemilu 2019 keterwakilan perempuan mencapai 40 persen.

Dalam mewujudkan partisipasi yang adil secara gender dalam kegiatan masyarakat dan negara terdapat konsep pengarusutamaan gender, artinya dalam pelaksanaan suatu program memperhatikan kebutuhan, aspirasi, pengalaman dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Hal ini dilakukan agar terselenggaranya kegiatan-kegiatan pembangunan dengan adanya partisipasi yang berperspektif gender. Keikutsertaan perempuan ini ditempuh karena beberapa alasan. Tuntutan kebutuhan keluarga yang semakin besar, sementara tingkat penghasilan yang didapat oleh anggota keluarga lain seperti suami, anak atau saudara belum mencukupi. Kedua adanya desakan keinginan untuk mengembangkan wawasan, agar tidak ketinggalan pengetahuan dan informasi tentang perkembangan lingkungan. Ketiga menambah jaringan komunikasi dengan masyarakat sehingga dapat menambah teman untuk saling tukar informasi (Karim, 2017).

2.1.2.3 Kendala Ketidakterlibatan Perempuan dalam Ruang Publik

Adapun kendala yang muncul yang menghambat perempuan untuk ikut serta dalam suatu kegiatan (Monica & Fauziah, 2017), yaitu diantaranya waktu, perempuan pada dasarnya merupakan ibu rumah tangga yang harus menjalani perannya sebagai serorang ibu untuk anak-anaknya dan juga istri bagi suaminya. Waktu yang dimiliki menjadi terbatas untuk dapat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tengah dilaksanakan di masyarakat. Lalu kendala yang muncul yaitu pengetahuan, ketidaktahuan mengenai peran dan suatu program akan menghambat berjalannya suatu program karena menyebabkan minimnya partisipasi. Lalu dana menjadi kendala dalam partisipasi perempuan untuk melaksanakan kegiatan. Terdapat pandangan yang ada pada masyarakat bahwa menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau peranan yang lebih dominan, sistem tersebut menempatkan status

dan peranan perempuan dibawah laki-laki. Sehingga muncul adanya stereotype dari perempuan yang dianggap lemah, emosional, sensitif, submitif, luwes, memerlukan perlindungan dan sebagainya hal ini menghalang perempuan dalam berpartisipasi serta keterbatasan akses dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan aktivitas publik (Habibah, 2015).

2.1.3 Program Kampung Iklim

2.1.3.1 Pengertian Program Kampung Iklim

Program kampung iklim merupakan kegiatan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, program ini dilakukan di tingkat tapak untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, dengan menekankan partisipasi aktif dari masyarakat (Albar dkk., 2017). Dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga pemerintah pun dilibatkan dengan tujuan mencapai target pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional atau global. Pelaksanaan Program Kampung Iklim ini memperkuat pengembangan kota ramah lingkungan, yang memperhatikan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang resilien terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan mendorong masyarakat untuk memiliki pola hidup dengan rendah emisi karbon.

Program kampung iklim ini diharapkan dapat membangun ketahanan sumber daya pangan, sumber daya air, dan energi akibat risiko perubahan iklim jangka panjang dan kejadian bencana alam yang semakin sering terjadi dalam skala yang lebih luas juga. Membangun ketahanan pangan, air dan energi ini dilakukan dengan cara berjenjang, mulai dari pembangunan tingkat desa sampai tingkat nasional (Albar dkk., 2017). Keadaan saat ini masih dapat dilakukan upaya-upaya penanggulangan bencana, utamanya menghadapi perubahan iklim. Membangun ketahanan setiap lokasi berbeda-beda bergantung pada kondisi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya

Program Kampung Iklim memberikan manfaat kepada masyarakat berupa pengetahuan dan pemahaman tentang perubahan iklim dan dampaknya. Masyarakat didorong untuk dapat memiliki kemandirian dalam melakukan aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim baik secara individu maupun kelompok. Aksi nyata

masyarakat adalah suatu usaha untuk turut serta dalam mengelola dan menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Ketangguhan masyarakat akan semakin meningkat pada kondisi perubahan iklim. Namun kondisi bencana tidak dapat diprediksi apakah sesuai dengan kemampuan masyarakat (Poetradewa & Wibowo, 2023).

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Program Kampung Iklim

Tujuan Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk kesadaran akan dampak perubahan iklim dengan melakukan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca. Adapun tujuan khusus Program Kampung Iklim, diantaranya:

- a. Melakukan gerakan adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi perubahan iklim di tingkat lokal dengan mendorong partisipasi aktif dari kelompok masyarakat.
- b. Adanya pengakuan kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.
- c. Memberikan pengakuan terhadap kelompok pendukung dalam pembentukan dan pengembangan program Kampung Iklim.
- d. Sebagai sarana percontohan atau penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diikuti di wilayah lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat (Emilda dkk., 2017).

2.1.3.3 Pendekatan, Prinsip dan Strategi ProKlim

Program Kampung Iklim menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat artinya dalam melakukan mobilisasi atau pengelolaan baik sumber daya manusia atau sumber daya alam dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, karena masyarakat sendiri yang mengetahui potensi masalah yang berada di wilayah mereka. Dalam proses pemberdayaan ini dilakukan usaha-usaha agar mendorong masyarakat memiliki kesadaran berkaitan dampak perubahan iklim. Masalah yang dimiliki masyarakat pastinya berbeda. Sehingga upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya.

Prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan ProKlim yaitu: (1) Berbasis masyarakat (*community based*), masyarakat adalah penggerak utama dalam mengelola sumber daya. (2) Berbasis sumber daya setempat (*local resource based*), hal ini memungkinkan mengembangkan kegiatan sesuai dengan kondisi lokal dalam memanfaatkan potensi yang ada. Dan (3) Berkelanjutan (*sustainable*), kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi dampak buruk perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan (Ghina & Zunariyah, 2017).

Kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya (1) Pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses yang berlangsung atau institusi penunjang dalam proses produksi. Dalam menjalankan suatu program masyarakat harus diberikan pemberian kesadaran. (2) Kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian. Implementasi Program Kampung iklim melibatkan semua pihak tanpa membeda-bedakan keahlian atau kecakapan. (3) Keamanan (*security*), Program Kampung Iklim memberikan rasa aman kepada seluruh makhluk hidup. (4) Keberlanjutan (*sustainability*), kegiatan yang dilaksanakan melalui proses pendampingan diharapkan terus-menerus dilakukan. dan (5) Kerjasama (*cooperation*), yang semuanya berjalan secara simultan dengan adanya dukungan dari luar seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi atau pun non-pemerintah (Albar dkk., 2017).

2.1.3.4 Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim)

Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mewujudkan pengendalian perubahan iklim. ProKlim diarahkan sebagai instrumen pengumpulan data dan informasi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Data dan informasi yang terkumpul dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan seluruh pihak terkait (termasuk dunia usaha) untuk mengembangkan kebijakan dan program/kegiatan penguatan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

a. Adaptasi

Adaptasi adalah suatu usaha makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang ada. Adaptasi berarti proses menjadi satu.

Adaptasi merupakan respon sesuatu terhadap sekelilingnya. Dalam konteks perubahan iklim, upaya adaptasi dilakukan untuk mengelola permasalahan yang tidak dapat dihindari. Singkat kata, adaptasi adalah upaya untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan.

Kegiatan adaptasi adalah runtunan kegiatan yang dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim, termasuk keanekaragaman iklim dan perubahan iklim yang ekstrim serta bisa di usahakan dan mengatasi perubahan iklim menjadi komponen yang penting terhadap perubahan iklim dimulai dari kegiatan (1) Pengendalian Kekeringan Banjir dan Longsor terkait iklim, (2) Peningkatan ketahanan pangan, (3) Penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, (4) pengendalian penyakit terkait iklim dan (5) kegiatan lain (Albar dkk., 2017). Menurut *Inter-government Panel on Climate Change (IPCC)*, terdapat lima komponen utama kegiatan adaptasi perubahan iklim (Aldrian dkk., 2011), yaitu:

1. Atribusi merupakan salah satu komponen perubahan iklim. Atribusi terhadap pemanasan global diantaranya menyebabkan letusan gunung api, sinar kosmis, dan perubahan radiasi matahari.
2. Kajian dan studi dampak. Contoh dari dampak langsung adalah perubahan pola hujan, kekeringan, banjir, kebakaran hutan, gelombang panas, angin puting beliung, dan lain-lain. Dengan memahami bahwa perubahan iklim adalah proses yang dimulai secara lambat dan laju yang pelan, saat ini semakin banyak dampak tidak langsung yang mulai dikenali. Contoh dampak tidak langsung adalah dampak sektoral seperti pola penyakit pada manusia dan tanaman, gangguan pariwisata, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya.
3. Kerentanan terhadap perubahan iklim. Kerentanan adalah ukuran ketidakberdayaan masyarakat atau komunitas terhadap upaya adaptasi terhadap bencana yang dihadapi dan dikombinasikan dengan faktor kesiapan komunitas tersebut untuk beradaptasi. Paparan bencana yang dimaksud adalah bencana iklim akibat dari perubahan iklim yang ditandai dengan bencana yang berhubungan dengan parameter iklim seperti curah hujan, angin, suhu, tekanan, kelembaban, dan tutupan awan.

4. Kapasitas adaptasi dan kajian kerentanan terhadap perubahan iklim. Kapasitas adaptasi berhubungan erat dengan daya tahan terhadap perubahan iklim dan merupakan ukuran kelenturan masyarakat dalam melakukan upaya adaptasi. Tidak ada ukuran yang universal dari kapasitas adaptasi sehingga ukuran kerentanan juga menjadi tidak seragam. Hal ini sangat berbeda dengan ukuran paparan bencana yang dapat diukur dalam satuan ilmiah. Kapasitas adaptasi menyangkut masalah sosial, ekonomi, dan budaya dengan jumlah faktor yang tidak terbatas berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan.
5. Risiko iklim. Risiko iklim adalah faktor yang diperoleh akibat peluang terjadinya bencana iklim dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kejadian iklim tersebut. Contohnya peningkatan peluang kejadian demam berdarah akibat meningkatnya peluang faktor iklim yang mendukung kondisi tersebut. Hal ini mengakibatkan peningkatan risiko iklim untuk kasus demam berdarah.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini akan berdampak terhadap pembangunan. Adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan aspek kunci yang harus menjadi agenda pembangunan nasional dalam rangka mengembangkan pola pembangunan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim dan gangguan anomali cuaca yang terjadi saat ini sertaantisipasi dampaknya kedepan. Contoh adaptasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yaitu pembuatan embung, biopori, sumur resapan, pembangunan bendungan air, pemanfaatan lahan pekarangan, melaksanakan PHBS, dll.

b. Mitigasi

Mitigasi adalah upaya mengatasi penyebab. Mitigasi berarti untuk memperkecil masalah yang muncul di masa depan, mitigasi perlu dilakukan agar mengurangi dampak yang kemungkinan terjadi. Mitigasi dalam perubahan iklim dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak pemanasan global di masa depan (Aldrian dkk., 2011). Beberapa upaya praktis yang dapat dilakukan untuk melakukan mitigasi agar laju perubahan iklim dan pemanasan global dapat

minimalisir adalah pengelolaan bank sampah, pembuatan kompos, biogas, penghijauan, dsb.

Program Kampung Iklim menekankan adanya melibatkan masyarakat terhadap lingkungan atau aspek ekologi. Hal yang kita dapat dapatkan dari alam jika terus di lakukan maka akan menjadi habis. Terdapat komponen mitigasi dalam Program Kampung Iklim yaitu (1) Pengolahan sampah, limbah padat, dan pengolahan limbah cair, (2) Penggunaan Energi Baru Terbarukan, Konservasi dan Pengehematan Energi, (3) Melakukan budidaya pertanian, dan (4) Meningkatkan tutupan vegetasi. komponen tersebut diharapkan akan mengurangi gas emisi rumah kaca yang dimulai dari tingkat lokal.

c. Kelembagaan

Kelembagaan dalam ProKlim bertujuan untuk memperkuat pemahaman mitra terhadap perubahan iklim, meningkatkan kapasitas pemerintah, dan membuka akses dukungan kebijakan ProKlim. Fungsi dari kelembagaan ini adalah untuk menginisiasi, mengorganisir, menggerakkan dan mengelola upaya adaptasi dan mitigasi (Nielwaty dkk., 2023). Kelembagaan diharapkan menyebarluaskan lokasi-lokasi yang telah melakukan upaya menghadapi perubahan iklim, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan perubahan. Kelembagaan dalam ProKlim menekankan adanya keberlanjutan dari program yang telah dibuat yang didukung oleh banyak pihak.

Masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan pada lokasi kampung iklim. Melalui pendekatan ini komitmen dan motivasi masyarakat akan meningkat, serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap program/kegiatan yang berjalan. Komitmen masyarakat harus selalu diperkuat agar mendukung jalannya kegiatan. Mempertimbangkan pentingnya hal tersebut, maka komponen kelembagaan dan dukungan keberlanjutan, diantaranya:

1. Kelompok masyarakat, terdapat kelompok masyarakat yang bertanggung jawab pada kegiatan yang telah direncanakan. Kelompok masyarakat ini berupaya mengkoordinir jalannya kegiatan.

2. Kebijakan, pemerintah setempat memberikan dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim).
3. Swadaya & Gender, masyarakat harus dinilai tingkat keswadayaannya, sistem pendanaan mandiri, dan partisipasi gender dalam pelaksanaan program ini.
4. Kapasitas, kapasitas masyarakat dalam melaksanakan ProKlim.
5. Dukungan eksternal, diantaranya pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya.
6. Pengembangan, terdapat pengayaan jenis dan skala aksi.
7. Manfaat, kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat sosial, ekonomi, lingkungan dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
8. Kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal (Albar dkk., 2017).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam rangka mendukung penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam Program Kampung Iklim (ProKlim), peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan, yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Hasil penelitian yang relevan ini, peneliti menjadikan referensi dalam penulisan skripsi. Adapun penelitian yang relevan yang ditemukan diantaranya:

- a. Penelitian dari Muhadhofah Triana Husna dan Mochamad Mustam pada tahun 2017 dengan judul **Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif-deskriptif. Hasilnya Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program Keluarga Berencana di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati masih rendah. Unsur-unsur yang ada dalam partisipasi yaitu partisipasi informasi, partisipasi konsultasi, partisipasi pengambilan keputusan, dan partisipasi bertindak.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Muliani Putri dan Wahyu Setyaningsih, penelitian pada tahun 2019 judulnya yaitu **Partisipasi Masyarakat Dalam**

Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Dusun Soka Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2019.

Menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan variabel penelitiannya pelaksanaan ProKlim dan partisipasi masyarakat. Teknik analisis datanya menggunakan statistika deskriptif dan deskriptif presentatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) pelaksanaan ProKlim di Dusun Soka sejak tahun 2017 masih berjalan hingga saat ini. Aspek ProKlim meliputi pengendalian banjir, peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, (2) dari 8 Dusun yang ada di Desa Lerep baru Dusun Soka yang menerapkan ProKlim karena dusun lain mempunyai daya tarik atau *branding* sendiri dan Desa Lerep adalah desa yang luas, apabila diterapkan secara bersamaan maka hasilnya tidak maksimal, (3) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ProKlim dibagi menjadi 4 yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan sebesar 37,7% (tinggi), partisipasi dalam pelaksanaan 52,46% (tinggi), partisipasi dalam pengambilan manfaat 57,38 (tinggi) dan partisipasi dalam evaluasi 34,43% (rendah).

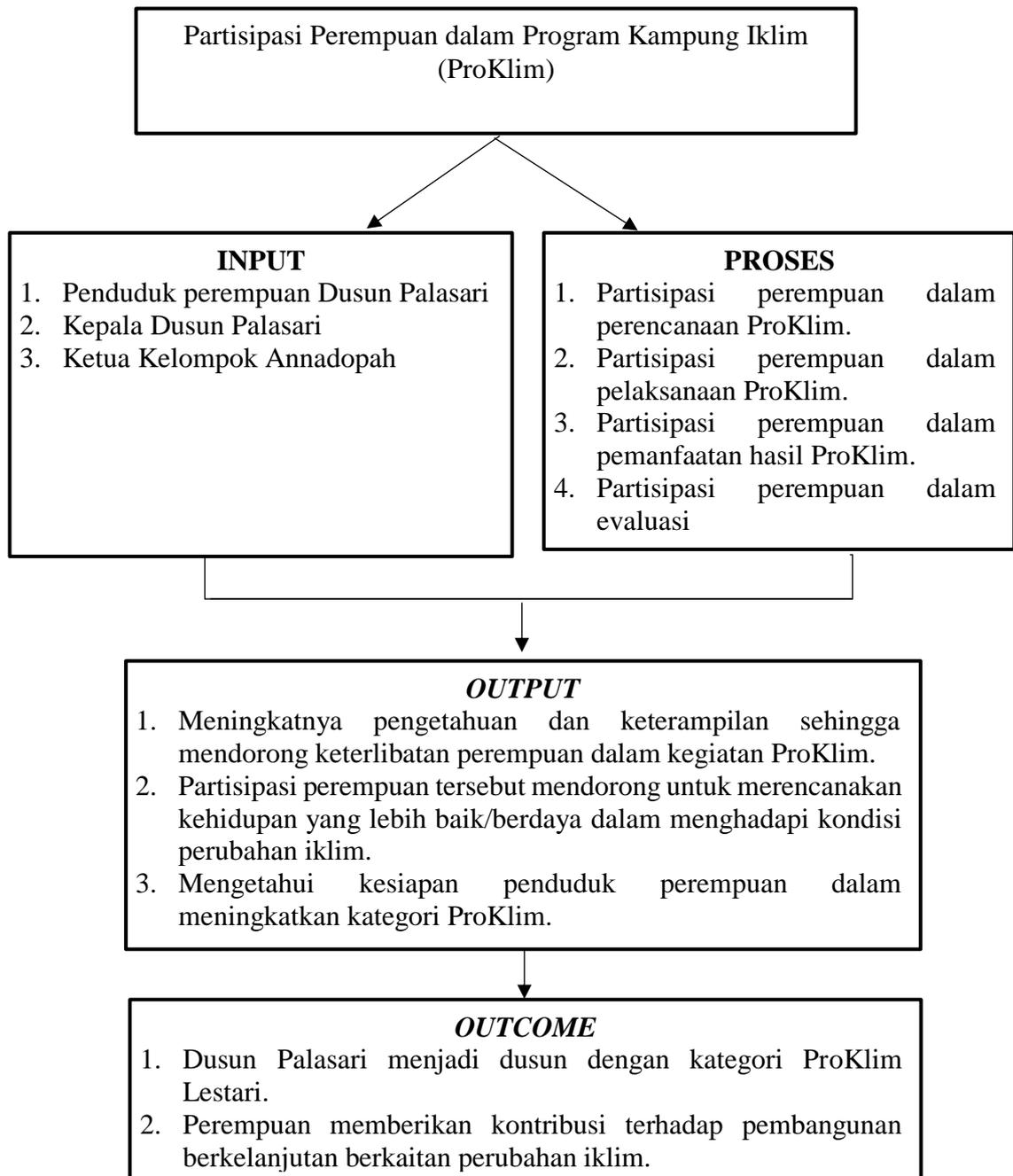
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Elly Nielwaty., dkk, pada tahun 2023 dengan judul **Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) Studi Pada RW12 Kelurahan Umbansari Kota Pekanbaru.** Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan secara fenomenologis dan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya target sesuai dengan standarisasi ProKlim diakibatkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam ProKlim di RW12 Kelurahan Umbansari, dikarenakan kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat yang apatis, serta faktor pekerjaan masyarakat yang menghambat tingkat partisipasi masyarakat terhadap ProKlim.
- d. Penelitian dilakukan oleh Poetradewa., dkk tahun 2023 dengan judul **Tahap Partisipasi Masyarakat Dan Faktor Penghambatan Serta Pendukung Dalam Program Kampung Iklim Berkelanjutan.** Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa Ngadirejo aktif tetapi cenderung menurun dalam program kampung iklim. Partisipasi tersebut dilihat dari pemanfaatan pekarangan rumah, bank sampah, pemanfaatan lahan kosong serta pemanenan air hujan. Adapun disimpulkan pada penelitian ini bahwa masyarakat mempunyai dampak positif seperti mudah dalam mendapatkan sayur dan pupuk, namun mempunyai dampak negatif yaitu ketika ada pendatang ke wilayah ini cenderung ada yang tidak membuang sampah pada tempatnya.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil temuan pada observasi pra-penelitian di Dusun Palasari Desa Sukahurip, didapatkan partisipasi yang kurang dari perempuan. Sebagai dusun yang telah mendapatkan apresiasi Program Kampung Iklim tingkat Utama Provinsi dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2021, ini merupakan suatu hal yang patut dipertahankan dalam upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat dusun. Untuk merespon hal tersebut maka upaya yang dilakukan harus adanya partisipasi perempuan dalam Program Kampung Iklim (ProKlim).

Dalam Program Kampung Iklim (ProKlim), terdapat input diantaranya penduduk perempuan yang terlibat di lapangan, lalu garis depan Dusun Palasari yaitu kepala dusun, dan ketua perancang program sebagai motor penggerak yaitu kelompok Annadopah. Ketiga input tersebut secara keseluruhan berpartisipasi melakukan serangkaian kegiatan untuk proses implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim). Proses tersebut yaitu dalam beberapa komponen, yaitu (1) Partisipasi perempuan dalam perencanaan ProKlim. (2) Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan ProKlim (3) Partisipasi perempuan dalam pemanfaatan hasil, ProKlim dan (4) dan Partisipasi perempuan dalam evaluasi ProKlim.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data serta memahami aspek yang akan dijadikan fokus penelitian, maka pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana partisipasi perempuan dalam Program Kampung Iklim?